

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tiap Negara memiliki arah tujuan utama untuk menaikkan derajat hidup atau ketenteraman seluruh penduduknya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu Negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin menaikkan derajat hidup dan ketenteraman penduduknya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu kelompok masyarakat untuk menaikkan derajat hidup penduduknya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Peningkatan ketenteraman ini antara lain dapat diukur dari peningkatan pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya. Menurut Sukirno, 2006 (Dalam Suzana dan Kapantow, 2014).

Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu Negara, permasalahan yang di hadapi Negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Bahkan, didirikannya atau dibentuknya sebuah Negara salah satu tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan telah dipilih, di tempuh dan dilakukan oleh sebuah Negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.

Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara individu yang memiliki pendapatan tinggi dengan individu yang memiliki pendapatan rendah. Semakin besar tingkat pendapatan maka semakin besar pula tindakan dalam distribusi pendapatan. Oleh karena itu peran pemerintah diperlukan untuk menyesuaikan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat dalam distribusinya juga dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ketimpangan pembangunan terus berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk tanda dan ukuran. Seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan dalam proses pembangunan itu sendiri. Munculnya kawasan-kawasan kumuh di tengah kota-kota besar, dan kawasan-kawasan pemukiman mewah di tengah pedesaan, adalah suatu bukti nyata dari adanya suatu ketimpangan yang terjadi. Perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan bukti lain dari ketimpangan. Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu; distribusi ukuran, yaitu besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi. Todaro, 2000 (Dalam Laloan Dkk, 2018).

Masalah distribusi pendapatan merupakan suatu hal yang sering terjadi dan diterima oleh setiap masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan meningkatkannya sumber daya yang ada dan pembangunan ekonomi yang merata. Menurut Suryono, 2000 (Dalam

Suzana dan Kapantow, 2014). Menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik sekaligus merata, sebab dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat.

Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam :

1. Pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah dan gaji atau besarnya tergantung tingkat produktivitas.
2. Pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga, hadiah, atau warisan, tetapi relevansi teori fungsional tidak mempengaruhi pentingnya peranan dan pengaruh kekuatan-kekuatan di luar pasar (faktor-faktor non ekonomis) misalnya kekuatan dalam menentukan faktor-faktor harga. (Laloan Dkk, 2018).

Kesempatan kerja di sektor-sektor industri besar, konstruksi, perdagangan dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun ketersediaannya lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan hal ini yang didominasi oleh sektor primer, sehingga menimbulkan masalah distribusi pendapatan terutama antara perkotaan dengan pedesaan.

Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam dsitribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit, sebab tidak ada satupun tindakan yang tidak mempengaruhi pihak lain secara positif maupun negatif, dikarenakan tindak keadilan bagi seseorang dengan orang lain pasti berbeda. Selanjutnya, pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter berkewajiban untuk merubah keadaan masyarakatan sehingga ketimpangan dsitribusi pendapatan dapat diminimalisasi (Mangkusoebroto,2001:6).

Masalah distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi adalah dua indikator yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki kepentingan yang berkaitan dan untuk melihat indikator tersebut melalui PDRB karena PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu proses tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga,sewa tanah dan

keuntungan), jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemusian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perbandingan merupakan gambaran hasil pembangunan antar suatu daerah dengan daerah yang lainnya, gambaran tersebut dapat dilihat dengan cara menjejerkan angka-angka Produk Domestik Regional Bruto di setiap provinsi. Adapun perbandingan yang di pakai yaitu PDRB atas harga dasar harga konstan.

Tabel 1.1

Laju Pertumbuhan Penduduk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Persen)

2016-2020

| PROVINSI | TAHUN | | | | |
|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sulawesi Utara | 6,16% | 6,31% | 6,00% | 5,65% | -001% |
| Sulawesi Tengah | 9,94% | 7,10% | 20,60% | 8,83% | 4,86% |
| Sulawesi Selatan | 7,42% | 7,21% | 7,04% | 6,91% | -070% |
| Sulawesi Tenggara | 6,51% | 6,76% | 6,40% | 6,50% | -065% |
| Gorontalo | 6,53% | 6,73% | 6,49% | 6,40% | -002% |
| Sulawesi Barat | 6,01% | 6,39% | 6,26% | 5,67% | -242% |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1 menjelaskan tentang PDRB atas dasar harga konstan menurut ke 6 provinsi di pulau Sulawesi, adapun urutannya yaitu dari yang terbesar sampai yang terkecil ialah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dan yang terakhir adalah Provinsi Sulawesi Barat.

Sektor atau faktor yang diduga mempengaruhi tingginya distribusi pendapatan adalah kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM nya lebih tinggi aka memiliki kualitas manusia yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya. Peningkatan IPM pada suatu daerah yang tidak diiringi dengan peningkatan IPM di daerah lainnya akan memicu terjadinya peningkatan distribusi pendapatan (Brata, 2002).

Terdapat tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan pengukuran IPM yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat perekonomian ketiga indikator ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi untuk meningkatkan IPM pemerintah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut disamping itu perlu juga diperhatikan faktor-faktor pendukungnya.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Sulawesi
2016-2020

| Provinsi | Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Sulawesi, 2016-2020 | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sulawesi Utara | 71,05 | 71,66 | 72,20 | 72,99 | 72,93 |
| Sulawesi Tengah | 67,47 | 68,11 | 68,88 | 69,50 | 69,55 |
| Sulawesi Selatan | 69,76 | 70,34 | 70,90 | 71,66 | 71,93 |
| Sulawesi Tenggara | 69,31 | 69,86 | 70,61 | 71,20 | 71,45 |
| Gorontalo | 66,29 | 67,01 | 67,71 | 68,49 | 68,68 |
| Sulawesi Barat | 63,60 | 64,30 | 65,10 | 65,73 | 66,11 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut data Susenas bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada 5 tahun terakhir antar Provinsi di Sulawesi dan Provinsi yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi yang mencapai 17% ada 4 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Untuk Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat mencapai nilai 16%. Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran ringkas rata-rata capaian dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup layak. Dan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi ini harus memperoleh perhatian yang sama besar karena ketiga dimensi ini sama pentingnya.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat didefinisikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap distribusi pendapatan di Sulawesi.
2. Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap distribusi pendapatan di Sulawesi.
3. Bagaimana pengaruh Umur Harapan Hidup Terhadap distribusi pendapatan di Sulawesi.

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengeluaran Perkapita terhadap distribusi pendapatan di Sulawesi.
2. Untuk mengetahui Rata-Rata Lama Sekolah terhadap distribusi pendapatan di Sulawesi.
3. Untuk mengetahui Umur Harapan Hidup terhadap distribusi pendapatan di Sulawesi.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Masalah Teoritis

Adapun manfaat dalam penelitian ini di harapkan agar bisa menjadi *literature* untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembacanya, terutama terkait keilmuan dibidang ekonomi.

b. Masalah Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dalam menambah informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor distribusi pendapatan di Sulawesi.

1. Manfaat bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang yang mempengaruhi distribusi pendapatan di Sulawesi.

2. Manfaat bagi mahasiswa

Sebagai bahan *literature* untuk mahasiswa menambah wawasan terkait tingkat distribusi pendapatan Sulawesi.

3. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat tentang distribusi pendapatan di Sulawesi.